

KOMUNIKASI DERADIKALISASI SATGAS INTELIJEN OPERASI MADAGO RAYA PADA MANTAN NARAPIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO

Andi Febri Herawati ^{1,*}; Robi Utomo ²; Ilyas Lampe ³; Febriany ⁴; Giskamala Rahmarini ⁵, Pusparani Sahran Putri ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Tadulako, Palu

*Correspondence : Herawati.febi18@gmail.com¹

ABSTRAK

Perubahan penanganan terorisme dalam Operasi Madago Raya dari pendekatan keras (*hard approach*) menuju pendekatan lunak (*soft approach*) mendorong penerapan komunikasi deradikalisasi yang persuasif dan humanis terhadap mantan narapidana terorisme di Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi deradikalisasi melalui penggalangan oleh Satgas Intelijen Operasi Madago Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma interpretif, dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan dua informan, yaitu satu personel Satgas dan satu mantan narapidana terorisme. Analisis dilakukan melalui pengumpulan kategori, interpretasi langsung, pencarian pola dan kesepadanan antarkategori, serta pengembangan generalisasi naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi deradikalisasi berlangsung melalui tahapan penyusupan, memengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan, hingga pemanfaatan. Penggalangan yang dilakukan secara persuasif dan humanis menjadi bagian penting dalam mendukung deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme.

Kata kunci

Komunikasi Deradikalisasi, Operasi Madago Raya, Satgas Intelijen

ABSTRACT

The shift in counterterrorism efforts under Operation Madago Raya from a hard approach to a soft approach has encouraged persuasive and humanistic deradicalization communication with former terrorism convicts in Poso Regency. This study aims to analyze deradicalization communication conducted through intelligence engagement by the Operation Madago Raya Intelligence Task Force. Using a qualitative approach, an interpretive paradigm, and a case study method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving two informants: one task force officer and one former terrorism convict. Data were analyzed through categorical aggregation, direct interpretation, pattern identification, correspondence across categories, and naturalistic generalization. The findings reveal that deradicalization communication involves stages of infiltration, influencing, directing and controlling, and utilization. The study concludes that persuasive and humanistic intelligence engagement plays an important role in supporting deradicalization and the social reintegration of former terrorism convicts.

Keywords

Deradicalization Communication, Intelligence Task Force, Operation Madago Raya,

Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan yang mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan penyebaran paham radikal, proses pembentukan jaringan, serta keberlanjutan ideologi ekstrem dalam kehidupan sosial. Radikalisme dapat berkembang melalui proses ideologis dan sosial yang memengaruhi cara individu memahami agama, kehidupan bermasyarakat, serta hubungan dengan kelompok yang berbeda. Ketika pemahaman tersebut berkembang menjadi pembenaran terhadap kekerasan, kondisi tersebut dapat mendorong keterlibatan individu dalam tindakan terorisme. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan dan penindakan, tetapi juga membutuhkan pendekatan pencegahan, pembinaan, perubahan pemahaman, serta reintegrasi sosial.

Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi tersebut memperkuat kerangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, termasuk upaya deradikalisasi terhadap individu yang telah terpapar atau terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam pelaksanaannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan berbagai program pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan salah satu pendekatan yang diarahkan untuk mengubah atau menetralisasi pemahaman dan sikap yang berkaitan dengan paham radikal pada individu yang telah terpapar atau terlibat dalam jaringan terorisme. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan pemikiran, tetapi juga diarahkan agar individu mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara konstruktif. Indrawan & Aji (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persoalan efektivitas program dan keberlanjutan proses pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan deradikalisasi tidak dapat hanya dilihat dari proses pembinaan selama individu berada di lembaga pasyarakatan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk kembali menjalani kehidupan sosial setelah memperoleh kebebasan.

Dalam perspektif komunikasi, deradikalisasi juga merupakan proses yang membutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Nugrahajati & Suparno (2024) menjelaskan bahwa program deradikalisasi dapat dipahami melalui perspektif komunikasi politik, khususnya berkaitan dengan penggunaan pendekatan *soft power* dan persuasi dalam mendorong perubahan pemahaman serta sikap mantan narapidana terorisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan deradikalisasi tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh bagaimana pesan dikonstruksi, disampaikan, serta diterima oleh individu yang menjadi sasaran program.

Komunikasi menjadi semakin penting ketika proses deradikalisasi memasuki tahap pendampingan dan kehidupan setelah narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Mukorobin et al. (2023) dalam penelitian mengenai komunikasi efektif dalam deradikalisasi mantan narapidana terorisme menunjukkan pentingnya komunikasi yang dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Proses komunikasi dalam deradikalisasi membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi individu, membangun hubungan, serta memberikan ruang bagi terjadinya dialog. Temuan

tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan mengenai perubahan pemahaman ideologis, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan dan kepercayaan yang mendukung proses perubahan individu.

Strategi komunikasi dalam proses deradikalisasi juga menjadi penting karena mantan narapidana terorisme tidak hidup dalam ruang sosial yang terpisah dari masyarakat. Setelah menyelesaikan masa pembinaan, mereka harus kembali berinteraksi dengan keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta masyarakat secara lebih luas. Pada tahap tersebut, muncul persoalan berupa stigma, kekhawatiran, prasangka, dan keterbatasan penerimaan sosial. Adianto & Subroto (2023) menjelaskan bahwa proses reintegrasi sosial kelompok rentan terorisme menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan dukungan yang bersifat holistik, termasuk dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah, serta program rehabilitasi yang berkelanjutan.

Reintegrasi sosial dengan demikian menjadi bagian penting dalam keberlanjutan proses deradikalisasi. Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme merupakan proses yang tidak berhenti ketika seseorang selesai menjalani masa pidana. Proses tersebut berkaitan dengan kemampuan individu untuk kembali menjalankan fungsi sosial dan memperoleh penerimaan dari lingkungan masyarakat. Hambatan dalam penerimaan sosial dapat menyebabkan munculnya jarak antara mantan narapidana terorisme dengan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan hubungan sosial dibangun secara bertahap melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan.

Proses reintegrasi sosial pada akhirnya membutuhkan interaksi yang berlangsung secara bertahap melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, komunikasi persuasif memiliki posisi penting karena perubahan pemahaman dan sikap pada individu tidak selalu dapat dicapai melalui penyampaian informasi secara langsung atau pendekatan yang bersifat instruktif. Komunikasi persuasif memberikan ruang bagi komunikator untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, memahami karakteristik komunikan, serta mendorong komunikan untuk mempertimbangkan kembali pandangan dan sikapnya melalui proses komunikasi yang berlangsung secara bertahap.

Secara konseptual, komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang diarahkan untuk memengaruhi sikap, keyakinan, opini, maupun perilaku seseorang melalui pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hovland, Janis, dan Kelley (1953) menempatkan karakteristik sumber, pesan, dan penerima pesan sebagai unsur penting dalam proses perubahan opini melalui komunikasi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan persuasi tidak hanya ditentukan oleh substansi pesan, tetapi juga oleh kredibilitas komunikator dan karakteristik penerima pesan. Dalam perkembangan kajian komunikasi persuasif, proses persuasi juga dipahami sebagai proses yang melibatkan pemrosesan pesan oleh penerima, persepsi terhadap sumber, serta kesesuaian pesan dengan karakteristik sasaran (Breves, 2023; Braca & Dondio, 2023).

Dalam konteks deradikalisasi, karakteristik tersebut menjadi semakin penting karena individu yang menjadi sasaran komunikasi memiliki pengalaman, latar belakang, keyakinan, dan pengalaman sosial yang beragam. Pesan yang sama tidak selalu menghasilkan respons yang sama pada setiap individu. Oleh karena itu, komunikasi persuasif membutuhkan strategi yang mempertimbangkan siapa yang menyampaikan pesan, apa pesan yang disampaikan, bagaimana pesan tersebut disampaikan, kepada

siapa pesan diarahkan, serta bagaimana respons komunikan terhadap pesan tersebut. Proses komunikasi juga membutuhkan kemampuan komunikator untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi dan respons individu yang menjadi sasaran.

Komunikasi persuasif dalam deradikalisasi dengan demikian tidak semata-mata berupa upaya menyampaikan argumentasi untuk mengubah pandangan seseorang. Persuasi dapat berlangsung melalui komunikasi interpersonal yang dibangun secara bertahap, termasuk percakapan, dialog, pemberian perhatian, pendampingan, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial. Interaksi yang dilakukan secara berulang memungkinkan komunikator dan komunikan membangun pengalaman komunikasi bersama. Dalam proses tersebut, kredibilitas komunikator dapat terbentuk, pesan dapat disesuaikan dengan kondisi komunikan, dan ruang dialog dapat berkembang sehingga memungkinkan terjadinya proses penerimaan dan pertimbangan terhadap pesan.

Pentingnya proses tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan konsep deradikalisasi. Horgan (2008) membedakan *deradicalization* dari *disengagement*. *Disengagement* berkaitan dengan berhentinya atau berkurangnya keterlibatan individu dalam aktivitas kelompok atau tindakan kekerasan, sedangkan *deradicalization* berkaitan dengan perubahan pada sikap, keyakinan, atau dukungan terhadap ideologi kekerasan. Dengan perbedaan tersebut, perubahan perilaku tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bukti terjadinya perubahan pemahaman. Oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi relevan untuk dikaji sebagai salah satu proses komunikasi yang dapat mendukung perubahan sikap dan pemahaman dalam proses deradikalisasi.

Dalam proses tersebut, komunikasi yang intensif dan berkelanjutan menjadi penting karena persuasi merupakan proses yang tidak selalu menghasilkan perubahan secara instan. Interaksi yang dilakukan secara berulang memberikan kesempatan bagi komunikator untuk mengenali karakteristik, pengalaman, dan kebutuhan komunikan. Pada saat yang sama, komunikan memperoleh kesempatan untuk mengenal komunikator, menilai kredibilitasnya, menyampaikan pandangan, serta memberikan respons terhadap pesan yang diterima. Proses timbal balik tersebut memungkinkan komunikasi berkembang dari sekadar penyampaian pesan menuju hubungan interpersonal yang lebih terbuka.

Dalam konteks penanganan mantan narapidana terorisme, komunikasi persuasif secara konkret dapat dilihat dalam pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh Satgas Intelijen Operasi Madago Raya. Pendekatan tersebut menempatkan interaksi dengan mantan narapidana terorisme tidak hanya dalam kerangka pengawasan, tetapi juga dalam konteks membangun hubungan dan komunikasi yang dapat mendukung proses deradikalisasi serta reintegrasi sosial. Komunikasi dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, dialog informal, pendampingan kegiatan produktif, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbagai bentuk interaksi tersebut menyediakan ruang bagi berlangsungnya komunikasi interpersonal secara intensif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif komunikasi persuasif, berbagai bentuk interaksi tersebut penting karena pesan persuasif tidak selalu disampaikan dalam bentuk ajakan yang eksplisit. Pesan dapat muncul melalui percakapan sehari-hari, pemberian informasi, pertukaran pengalaman, keteladanan, maupun keterlibatan bersama dalam aktivitas sosial. Dengan demikian, strategi komunikasi persuasif tidak hanya dapat dilihat dari isi pesan yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana komunikator membangun hubungan, memilih waktu dan situasi komunikasi, menggunakan bahasa yang dapat diterima komunikan, serta menyesuaikan pendekatan berdasarkan respons yang muncul.

Kredibilitas komunikator juga menjadi aspek yang penting dalam proses tersebut. Ketika komunikator dipersepsikan memiliki pengetahuan, konsistensi, keterbukaan, dan perhatian terhadap kondisi komunikan, hal tersebut dapat mendukung terbentuknya kepercayaan dalam hubungan komunikasi. Dalam konteks deradikalisasi, kepercayaan menjadi penting karena proses komunikasi berhadapan dengan individu yang memiliki pengalaman dan pandangan tertentu terhadap aparat maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, strategi persuasif tidak dapat dipisahkan dari proses membangun hubungan interpersonal antara komunikator dan komunikan.

Selain komunikator, konstruksi pesan juga menjadi bagian penting dalam komunikasi persuasif. Pesan yang berkaitan dengan perubahan pemahaman, nilai kebangsaan, toleransi, kehidupan bermasyarakat, maupun penolakan terhadap kekerasan perlu disampaikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan pengalaman komunikan. Pendekatan komunikasi yang terlalu konfrontatif dapat berpotensi menciptakan resistensi, sedangkan pendekatan yang dialogis dapat memberikan ruang bagi komunikan untuk menyampaikan pandangan dan mempertimbangkan pesan yang diterimanya. Oleh karena itu, penelitian mengenai komunikasi persuasif perlu melihat bukan hanya pesan apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dikonstruksi dan disampaikan dalam interaksi.

Penelitian terbaru mengenai komunikasi persuasif dalam konteks deradikalisasi di Indonesia juga menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Purwosunu et al. (2026) menemukan bahwa komunikasi persuasif dalam upaya deradikalisasi dapat dilakukan melalui dialog, konseling, serta pendekatan yang menekankan kredibilitas komunikator, daya persuasif pesan, kesadaran, empati, dan reintegrasi sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi persuasif dalam deradikalisasi tidak hanya berorientasi pada perubahan pemikiran secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung melalui pembangunan hubungan dan pengalaman sosial yang mendukung proses perubahan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses reintegrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan dan program formal, tetapi juga membutuhkan ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung. Ruang komunikasi yang terlalu formal dapat menciptakan jarak psikologis dan sosial antara pihak yang melakukan pendampingan dengan individu yang menjadi sasaran komunikasi. Sebaliknya, ruang komunikasi informal dapat memungkinkan interaksi berlangsung secara lebih cair dan memberikan kesempatan bagi individu untuk membangun hubungan melalui pengalaman komunikasi sehari-hari. Dalam ruang tersebut, komunikasi persuasif dapat berlangsung secara lebih interpersonal melalui dialog, percakapan, pendampingan, dan keterlibatan bersama dalam aktivitas sosial.

Atas dasar tersebut, praktik komunikasi persuasif Satgas Intelijen Operasi Madago Raya menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi persuasif dibangun dan diterapkan dalam interaksi dengan mantan narapidana terorisme, bagaimana komunikator membangun kredibilitas dan kepercayaan, bagaimana pesan dirancang dan disampaikan, bagaimana pendekatan disesuaikan dengan karakteristik komunikan, serta bagaimana komunikasi yang intensif dan berkelanjutan ditempatkan dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial di Sulawesi Tengah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam Komunikasi Deradikalisasi Satgas Intelijen Ops Madagoraya pada Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Poso. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman, perspektif, proses interaksi, serta pemaknaan yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Ravitch & Carl, 2020). Studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks dan berbagai sumber data. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus sesuai digunakan dalam penelitian ini karena objek yang dikaji merupakan fenomena spesifik, yaitu Komunikasi Deradikalisasi Satgas Intelijen Ops Madagoraya pada Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Poso. (Creswell & Creswell, 2023). Kabupaten Poso dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki karakteristik historis dan sosio-politik yang sangat strategis dalam kajian deradikalisasi serta keamanan kawasan. Sebagai salah satu daerah bekas konflik yang pernah menjadi basis pergerakan kelompok radikal di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso kini berada dalam tahap transisi menuju pemulihan keamanan dan reintegrasi sosial pasca operasi kepolisian dan militer, seperti Operasi Madago Raya.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai fenomena yang diteliti. Ravitch & Carl (2020) menekankan pentingnya kesesuaian antara tujuan penelitian, konteks, partisipan, dan strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Personel Satgas Ops Madago Raya dan mantan narapidana terorisme. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria: 1) mengetahui atau terlibat dalam pelaksanaan deradikalisasi; 2) memiliki pengalaman berkomunikasi dalam kegiatan tersebut; 3) memahami konteks komunikasi antara Personel Satgas Ops Madago Raya dan mantan narapidana terorisme; 4) bersedia menjadi informan; dan 5) mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Fathurokhmah (2024) menjelaskan bahwa dalam penelitian komunikasi kualitatif, pemilihan informan perlu disesuaikan dengan fokus dan karakteristik fenomena yang dikaji agar data yang diperoleh mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini dipilih dari Personel Satgas Ops Madago Raya dan mantan narapidana terorisme. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data dan kecukupan informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1	IPDA. Nelwan	Personel Ops Madago Raya
2	DL	Mantan narapidana terorisme

Sumber: Peneliti (2025)

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena komunikasi yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung Komunikasi Deradikalisasi Satgas Intelijen Ops Madagoraya pada Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Poso, bentuk hubungan antara Personel Satgas Ops Madago Raya dan mantan narapidana terorisme, serta respons yang muncul selama proses interaksi, pengamatan dilakukan 2 kali dalam seminggu serta durasi pengamatan 2 s/d 3 jam . Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan mereka mengenai proses komunikasi dalam membangun hubungan dan kepercayaan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, yang dapat berupa foto kegiatan, catatan kegiatan, dokumen serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data oleh Stake (dalam Cresswell, 2014: 278) menjelaskan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu (1) pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; (2) interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna tanpa mencari beragam contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna; (3) peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel yang menunjukkan hubungan antara dua kategori; (4) pada akhirnya peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan melalui deskripsi data penelitian, penelaahan tema-tema yang ada, serta penonjolan- penonjolan pada tema tertentu (Cresswell, 2014: 65). Rancangan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik wawancara maupun pencatatan dari dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melaksanakan proses reduksi data. Proses reduksi data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan telaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai Komunikasi Deradikalisasi Satgas Intelijen Ops Madagoraya pada Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Poso. kemudian memilah-milahnya kedalam kategori tertentu. Langkah selanjutnya penulis membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu Komunikasi Deradikalisasi Satgas Intelijen Ops Madagoraya pada Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Poso dengan mudah diketahui Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari

berbagai sumber dan bersifat sementara sambil mencari data pendukung lainnya. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang akan diambil dengan data pembandingan dari teori tertentu. Hal itu peneliti lakukan guna melihat kebenaran hasil analisis yang akan melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Ketika Operasi Tinombala yang sudah berjalan sejak 2016-2020 hendak memasuki Tahap IV, atas inisiatif Irjen Pol Abdul Rakhman Baso berubah nama menjadi Operasi Madago Raya yang dalam bahasa Bare'e artinya "baik hati". Ada banyak hal-hal yang melatar belakangi perubahan nama sandi operasi, tetapi yang paling utama adalah perubahan strategi dari operasi penegak hukum yang lazimnya menggunakan pendekatan keras (*Hard Approach*) atau tempur, kali ini porsinya dibagi dengan operasiimbangan yang menggunakan pendekatan lunak (*Soft Approach*) yang memiliki peran *krusial* dari keberhasilan Operasi Madagoraya. Pendekatan lunak dalam Operasi Madago Raya dimanifestasikan pada pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Intelijen, Preemtif dan Preventif.

Tujuan Operasi madago raya menciptakan situasi aman dan kondusif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan paham radikal dan penanggulangan terorisme di wilayah operasi, kemudian mencegah serta menetralisasi berkembangnya paham radikal maupun bibit terorisme dimasyarakat. Selanjutnya melaksanakan penggalangan dan deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme, keluarga kelompok radikal, simpatisan guna menciptakan stabilitas kamtibmas di wilayah operasi.

Penggalangan adalah upaya aktivitas, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana serta terus menerus dalam serangkaian kegiatan intelegen guna membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif sesuai yang diharapkan. Kegiatan utama yang sering dilaksanakan dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap terorisme adalah deradikalisasi, disebabkan aksi terorisme selalu berakar pada paham radikalisme, sehingga factor utamanya adalah pemahaman dan pemikiran dari pelaku terorisme. Tugas dan fungsi dari Satgas Intelijen Ops Madago raya adalah melakukan penggalangan dengan 4 tahapan yaitu : penyusupan, mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan, serta pemanfaatan. Langkah awal yang dilakukan adalah penyusupan, dimana tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan aktivitas mantan narapidana terorisme dengan mencari informasi melalui keluarganya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat diwilayah Operasi Madago Raya. Berikut hasil wawancara dengan informan IPDA. Nelwan, mengatakan bahwa :

"Pada tahapan penyusupan ini hal yang kami lakukan adalah mencari informasi tentang keberadaan mantan narapidana terorisme dan mengamati aktivitasnya melalui keluarganya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Dan kadang juga kami mencari informasi lewat mantan napiter yang sudah masuk kategori hijau (pro NKRI). karena informasi tersebut sangat membantu kami untuk melakukan tahap berikutnya. Tahapan ini membantu kami mengenali secara karakteristik dan aktivitas mantan napiter". (Hasil wawancara 5 April 2025)

Tahapan penyusupan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan penggalangan mantan narapidana terorisme, sebagai upaya deradikalisasi bisa berjalan dengan baik atau tidak. Sinergitas dan kerjasama antara Satgas intelijen

dengan berbagai pihak dibutuhkan dalam tahapan ini, dikarenakan mantan narapidana terorisme pernah terpapar paham radikal, sehingga mereka mengalami perubahan karakteristik dan pola pikir dalam aspek agama, kehidupan sosial dan bernegara.

Radikalisme adalah pemahaman atau pemikiran dari suatu aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik (mengatasnamakan agama islam) dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Menurut penelitian Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia Solahudin mengemukakan bahwa sulitnya menentukan apakah program deradikalisasi berhasil atau gagal. Program yang dirintis sejak tahun 2002 tidak punya basis data sebagai referensi. Setidaknya terdapat 3 kelemahan dalam program deradikalisasi yaitu pertama, orang yang menjadi objek deradikalisasi tidak pernah diukur tingkat radikalismenya, tidak bisa dibandingkan sebelum dan sesudah intervensi. Kelemahan program deradikalisasi yang kedua adalah sasaran program yang tidak tepat, yang dideradikalisasi orang yang sudah *disengagement* atau orang yang sudah berkomitmen tidak melakukan kekerasan lagi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti bahwa tidak adanya basis data mantan narapidana terorisme, yang bisa menjadi referensi bagi Satgas Intelijen Ops. Madagoraya. untuk mendapatkan data tersebut Satgas Inteligen Ops Madagoraya melakukan penyusupan dalam mengumpulkan data-data mantan narapidana terorisme khusus di wilayah Operasi Madagoraya. Berikut kutipan wawancara Informan IPDA Nelwan, mengatakan bahwa :

"Berdasarkan data dari hasil tahapan penyusupan, maka kami melakukan pemetaan untuk menentukan JTO (Jumlah target operasi) yang masuk kategori merah, kuning, dan hijau. Dari hasil pemetaan dan analisa kami menentukan 46 orang yang menjadi target operasi, terdiri dari : 11 orang kategori merah, 32 orang kategori kuning, dan 3 orang kategori hijau. Kategori merah indikatornya adalah masih berpaham radikal, terorisme dan intoleran, masih tertutup/menolak kebijakan pemerintah/ menolak NKRI, tidak bersosialisasi dengan masyarakat (bebas murni, tidak ikrar kepada NKRI). Kategori kuning : masih berpaham radikal dan intoleran, masih tergabung dengan kelompoknya, sudah bersosialisasi dengan masyarakat umum, bersifat terbuka/mau menerima kebijakan pemerintah dan aparat keamanan (bebas bersyarat, sudah ikrar kepada NKRI). Kategori hijau : sudah tidak berpaham radikal, menerima kebijakan pemerintah, bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, dan tidak bergabung dengan kelompoknya (bebas bersyarat dan ikrar kepada NKRI)." (Hasil wawancara 5 April 2025)

Menentukan kategori merah pada mantan narapidana terorisme beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk sikap terhadap program deradikalisasi, tingkat keterlibatan dalam jaringan terorisme, dan potensi resiko kekambuhan. Katogori merah biasanya ditujukan untuk mantan napiter yang menolak mengikuti program deradikalisasi dan menunjukkan sikap yang tetap radikal.

Setelah data terkumpul kemudian Satgas Intelijen melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu mempengaruhi. Proses mempengaruhi adalah sebuah kegiatan atau rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi orang lain, kelompok, atau bahkan suatu organisasi agar dalam bertindak, berpikir, atau merasakan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang memengaruhi. Proses mempengaruhi mantan narapidana terorisme tentunya membutuhkan komunikasi yang tepat melalui *soft approach*, agar secara bertahap dapat merubah pola pikir mereka dari radikal menjadi moderat dan pluralis. berikut kutipan wawancara informan Ipda Nelwan, mengatakan bahwa:

"Tahapan mempengaruhi diawali dengan bersilaturahmi, dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kami menjalin silaturahmi, pertemuan awal-awal responnya kurang baik apalagi yang eks yang kategori merah, bahkan kami sering mengalami penolakan, tetapi biasanya saat berkunjung kami melibatkan pihak keluarga atau tokoh masyarakat untuk memfasilitasi kami membangun komunikasi yang baik dengan para mantan eks ini." (Hasil wawancara 5 April 2025)

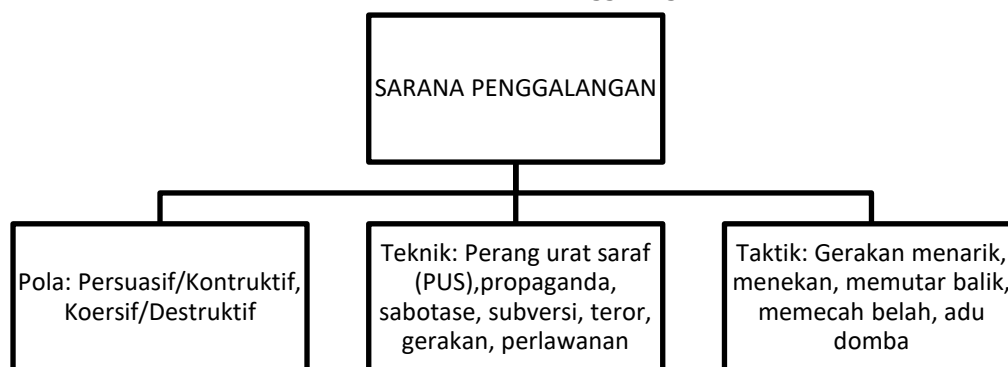
Kemudian informan menambahkan bahwa :

"Untuk merubah pola pikir para eks napiter ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kita ketahui bersama mereka masih dan pernah terpapar paham radikal, dimana mereka selalu merasa paling benar dalam memahami konsep agama dan mereka memiliki ideology yang kuat dan konsisten, sehingga dalam proses mempengaruhi kami lakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan humanis, serta mencoba membantu ketika mereka membutuhkan bantuan dalam hal informasi tentang membangun usaha, dan tentunya dalam proses ini kami bekerjasama dengan Satgas Preemptif dengan Dai Kamtibmas (tapi hanya untuk eks kategori kuning dan hijau), sementara yang kategori merah kami hanya menyampaikan himbauan kamtibmas dan terus memantau aktifitasnya". (hasil wawancara 5 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pola yang dilakukan untuk mempengaruhi mantan narapidana terorisme adalah melalui pendekatan persuasif tanpa menyinggung ideology dan diperlukan adanya pendekatan lunak atau *Soft approach*, kegiatan dilakukan dengan bersilaturahmi kerumah-rumah para mantan narapidana terorisme secara berkala maupun dadakan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin komunikasi aktif yang mengedepankan persaudaraan yang dapat memberikan sumbangan ide dan gagasan dalam meningkatkan kemandirian dalam usaha, kemudian himbauan kamtibmas juga menjadi informasi utama yang diberikan kepada mantan narapidana terorisme.

Pelaksanaan penggalangan melalui tahapan mempengaruhi sebagai upaya deradikalisasi, meliputi pola, teknik, taktik dan juga media yang sesuai. Mengingat penggalangan merupakan operasi psikologi yang diperhatikan yaitu: emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi. Berikut ditunjukkan diagram sarana penggalangan:

Gambar 1. Sarana Penggalangan



Sumber: Wahyu Y. Saronto, Intelijen (Teori Intelijen dan pembangunan jaringan) 2018

Teori deradikalisasi John G. Horgan yang menyatakan bahwa deradikalisasi dibagi dibagi kedalam dua komponen yaitu *behavioral disengagement* sebagai pengurangan atau penghentian keterlibatan fisik dalam aktivitas kekerasan atau aksi radikal dan *psychological disengagement* sebagai perubahan sikap atau keyakinan. Apabila dihadapkan pada situasi bahwa masih adanya temuan keterlibatan sebagian kecil

mantan narapidana terorisme melakukan aksi radikal terorisme, maka perlu menjadi bahan evaluasi bahwa para mantan narapidana terorisme masih perlu pengawasan dan pembinaan. Satgas Intelijen Ops Madagoraya dalam menyikapi hal tersebut dimanifestasikan pada kegiatan tahapan mengarahkan dan mengendalikan. Kegiatan ini dilakukan tentunya masih dengan pendekatan secara persuasif dan humanis. Berikut kutipan wawancara informan Ipda Nelwan, mengatakan bahwa :

"Pada tahapan ini akan dilanjutkan ketika mantan narapidana terorisme sudah mau membuka diri, menerima dengan baik saat kami bersilaturahmi, hubungan sudah terjalin dengan baik biasanya komunikasi yang terjalin tidak kaku lagi, kadang kami kumpul diwarung kopi untuk berdiskusi tentang banyak hal, salah satunya kami mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifat nya positif, memberikan pandangan-pandangan untuk kesmbali bersosialisasi dilingkungan sosial mereka, melibatkan mereka dalam menjaga kamtibmas (ketertiban dan keamanan masyarakat), dan meminta mereka untuk melaporkan ke kami ketika ada aktifitas yang mengarah ke radikallisme." (Hasil wawancara 5 April 2025)

Pernyataan Ipda Nelwan dipertegas oleh informan mantan narapidana terorisme DL, mengatakan bahwa :

"Sering sekali kita dikumpulkan diwarkop sama bapak-bapak dari Ops. Madago raya, saat kumpul-kumpul pokoknya yang sering disampaikan itu "carilah kegiatan yang positif, fokus dipekerjaan saja, tidak usah ngoni-ngoni (kalian) terpengaruh dengan aktivitas yang dulu, kalau ada yang coba pengaruhi lagi ngana lapor dengan kita e. (kalian lapor dengan kami), tenang-tenang saja menjalani hidup supaya masa depan bagus. (Hasil wawancara 24 April 2025)

Gambar 1. Aktivitas Mengarahkan dan Mengendalikan



Sumber: Dokumentasi Satgas Intelijen Ops. Madagoraya, Tahun 2025

Aktivitas mengarahkan dan mengendalikan akan dilanjutkan ketika respon baik dan positif telah diterima oleh personel Satgas Intelijen Ops Madagoraya dari para mantan narapidana terorisme. Tahapan ini tentunya dilakukan dengan santai dan tidak kaku, agar mereka tidak segan untuk menyampaikan semua hal yang mereka alami, rasakan dan butuhkan, yang kiranya bisa difasilitasi dan dibantu untuk mencari solusi yang terbaik. Mengarahkan dan mengendalikan adalah dua fungsi manajemen yang penting dalam mencapai tujuan deradikalisasi. Mengarahkan adalah proses memberikan arahan atau instruksi kepada mantan narapidana terorisme untuk melakukan aktifitas yang positif, sedangkan mengendalikan adalah proses memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan oleh Satgas Intelijen. Tahap pemanfaatan juga menjadi aktivitas utama dalam proses penggalangan dalam program deradikalisasi.

Tahap pemanfaatan berkaitan dengan memanfaatkan media sebagai sarana deradikalisasi dengan menyebarkan informasi yang benar, edukasi tentang

keberagaman, dan dialog antar agama. Program deradikalisasi juga bisa melibatkan mantan narapidana terorisme sebagai narasumber dan pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan penggiat media cetak, elektronik, dan online untuk mencegah penyebarab konten ataupun mempublikasikan aktivitas positif mantan narapidana terorisme ketika kembali ke masyarakat. Hal tersebut yang kemudia telah dilakukan oleh Satgas Intelejen Ops Madago Raya. Berikut kutipan wawancara informan Ipda Nelwan, mengatakan bahwa :

"Satgas Intelejen Ops. Madagoraya ada MoU dengan berbagai Media cetak online skala regional dan nasional, yang membantu mempublikasikan berita tentang program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Ops. Madagoraya, dan berbagai aktivitas positif para mantan narapidana terorisme, tentunya tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa diwilayah Sulawesi Tengah khususnya di wilayah operasi program deradikalisasi masih berjalan dan mendapat dukungan dari masyarakat dan para mantan narapidana terorisme, dengan harapan para kelompok radikal enggan untuk mempengaruhi kembali para mantan narapidana terorisme, agar mereka juga bisa melihat bahwa para mantan narapidana terorisme bisa diterima dimasyarakat dan bisa melakukan hal-hal yang baik dan positif. Kemudian bisa menjalani kehidupan yang lebih baik." (Hasil wawancara 5 April 2025).

Gambar 2. Dokumentasi Pemberitaan Media



Sumber : Satgas Intelejen Ops Madago Raya (2025)

Media menjadi sarana bagi satgas intelejen dalam mempublikasikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme. Kerjasama dengan berbagai media pun dilakukan baik skala regional dan nasional yaitu media cetak *online* Alkhairat, *Chanel* Sulawesi, Buletin, kabar selebes, Diksi. Ketika Media yang digunakan dengan maksimal, maka setiap informasi yang diberikan akan maksimal juga dan pendengar, penerima, atau pembaca informasi dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa strategi Satgas Intelijen Operasi Madago Raya dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme di Sulawesi Tengah dilakukan melalui empat tahapan, yaitu penyusupan, memengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan, serta pemanfaatan. Keempat tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian proses komunikasi yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, komunikasi persuasif menjadi pendekatan yang menonjol, terutama melalui komunikasi interpersonal, silaturahmi, pendekatan humanis, dan penyesuaian pesan dengan karakteristik mantan narapidana terorisme.

Tahap penyusupan merupakan langkah awal yang dilakukan Satgas Intelijen untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan, aktivitas, karakteristik, dan kondisi sosial

mantan narapidana terorisme. Informasi diperoleh melalui keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat, serta mantan narapidana terorisme yang telah berada dalam kategori tertentu. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk memetakan 46 mantan narapidana terorisme ke dalam tiga kategori, yaitu 11 orang kategori merah, 32 orang kategori kuning, dan 3 orang kategori hijau. Kategorisasi tersebut didasarkan pada kondisi ideologis, hubungan dengan kelompok, penerimaan terhadap pemerintah dan NKRI, serta kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum komunikasi persuasif dilakukan, Satgas terlebih dahulu berupaya memahami karakteristik pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Dalam perspektif komunikasi persuasif Hovland, Janis, dan Kelley (1953), karakteristik penerima pesan merupakan salah satu unsur penting dalam proses persuasi karena respons terhadap pesan tidak terlepas dari kondisi dan karakteristik komunikan. Dengan demikian, pemetaan terhadap mantan narapidana terorisme dapat dipahami bukan hanya sebagai kegiatan identifikasi sasaran, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai.

Perbedaan karakteristik antara kategori merah, kuning, dan hijau menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi tidak dapat diterapkan secara seragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kategori merah cenderung menunjukkan penolakan dan sikap tertutup, sedangkan kategori kuning relatif lebih terbuka terhadap pemerintah dan lingkungan sosial. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk komunikasi yang digunakan pada tahap berikutnya.

Temuan ini juga dapat dipahami melalui perspektif Horgan (2008) yang membedakan *deradicalization* dengan *disengagement*. Berhentinya seseorang dari keterlibatan dalam kelompok atau aktivitas tertentu tidak secara otomatis menunjukkan perubahan ideologis. Oleh karena itu, identifikasi terhadap hubungan individu dengan kelompok, sikap, serta kondisi sosial menjadi penting untuk melihat posisi mereka dalam proses perubahan.

Setelah proses identifikasi dilakukan, Satgas memasuki tahap memengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah *soft approach* melalui silaturahmi, komunikasi interpersonal, pendekatan persuasif dan humanis. Pada tahap awal, komunikasi tidak selalu memperoleh respons positif. Beberapa mantan narapidana terorisme, terutama kategori merah, menunjukkan penolakan atau sikap tertutup. Karena itu, komunikasi dilakukan secara bertahap dengan membangun hubungan terlebih dahulu. Keluarga dan tokoh masyarakat juga dapat menjadi pihak yang membantu membuka ruang komunikasi.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa strategi komunikasi persuasif yang digunakan Satgas tidak berorientasi pada penyampaian pesan secara langsung untuk mengubah pandangan ideologis, tetapi diawali dengan membangun hubungan interpersonal. Satgas melakukan kunjungan ke rumah, menjalin silaturahmi, membicarakan persoalan kehidupan sehari-hari, memberikan informasi mengenai peluang usaha, serta menyampaikan imbauan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam teori komunikasi dan persuasi Hovland et al. (1953), proses persuasi berkaitan dengan hubungan antara komunikator, pesan, dan komunikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur komunikator menjadi penting karena Satgas perlu membangun penerimaan terlebih dahulu sebelum pesan dapat disampaikan secara lebih

terbuka. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kredibilitas dan hubungan interpersonal menjadi bagian dari proses persuasi.

Temuan ini sejalan dengan kajian komunikasi persuasif yang menempatkan karakteristik penerima dan penyesuaian pesan sebagai bagian penting dari proses persuasi. Breves (2023) menunjukkan bahwa persuasi merupakan proses yang dipengaruhi oleh bagaimana penerima memproses pesan, sedangkan Braca dan Dondio (2023) menekankan adanya keterkaitan antara karakteristik penerima, teknik persuasi, dan desain pesan. Dalam penelitian ini, penyesuaian tersebut terlihat dari perbedaan pendekatan yang diterapkan berdasarkan kondisi masing-masing mantan narapidana terorisme.

Jika dikaitkan dengan Horgan (2008), komunikasi pada tahap memengaruhi dapat dipahami sebagai bagian dari proses yang mendukung perubahan sikap, pemahaman, dan keterlibatan individu. Namun, hasil penelitian ini belum menunjukkan bahwa komunikasi tersebut secara langsung menyebabkan perubahan ideologis. Temuan yang lebih kuat menunjukkan bahwa komunikasi persuasif digunakan untuk membuka hubungan, membangun penerimaan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses deradikalisasi.

Tahap berikutnya adalah mengarahkan dan mengendalikan. Tahap ini dilakukan ketika mantan narapidana terorisme mulai membuka diri dan menerima kehadiran Satgas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi lebih informal dan tidak kaku. Interaksi bahkan dilakukan dalam situasi sehari-hari, seperti bertemu di warung kopi. Dalam komunikasi tersebut, Satgas memberikan arahan mengenai kegiatan positif, pentingnya kembali bersosialisasi, fokus pada pekerjaan, serta menjauhi pengaruh dari aktivitas masa lalu.

Perubahan bentuk komunikasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan hubungan antara komunikator dan komunikan. Apabila pada tahap memengaruhi komunikasi digunakan terutama untuk membuka hubungan, pada tahap mengarahkan komunikasi berkembang menjadi interaksi yang lebih dialogis. Mantan narapidana terorisme tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi. Kondisi tersebut membuat komunikasi persuasif berlangsung secara lebih interpersonal dan berkelanjutan.

Dalam konteks deradikalisasi, komunikasi semacam ini penting karena perubahan tidak selalu berlangsung secara langsung. Horgan (2008) membedakan *disengagement* dari *deradicalization*. Keterlibatan dalam aktivitas positif, kembali bersosialisasi, dan tidak lagi terlibat dalam kelompok dapat menunjukkan aspek *disengagement*, sedangkan perubahan terhadap keyakinan atau dukungan terhadap ideologi kekerasan merupakan dimensi yang lebih dekat dengan deradikalisasi. Oleh karena itu, perubahan perilaku yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti telah terjadinya deradikalisasi secara menyeluruh.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi persuasif berperan sebagai proses pendukung yang berjalan bersama dengan perubahan perilaku dan proses reintegrasi sosial. Komunikasi yang intensif memberikan ruang bagi hubungan yang lebih terbuka sehingga arahan mengenai aktivitas positif dan kehidupan sosial dapat disampaikan secara berkelanjutan. Tahap terakhir adalah pemanfaatan. Pada tahap ini, komunikasi tidak lagi hanya diarahkan kepada mantan narapidana terorisme, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi lingkungan sosial tempat mereka kembali. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Satgas bekerja sama dengan media untuk mempublikasikan program deradikalisasi dan aktivitas positif mantan narapidana terorisme. Media yang digunakan antara lain media cetak dan media daring di tingkat regional maupun nasional.

Pemanfaatan media menunjukkan adanya perluasan sasaran komunikasi. Apabila pada tahap sebelumnya komunikasi terutama berlangsung secara interpersonal, pada tahap ini komunikasi berkembang menjadi komunikasi publik. Informasi mengenai aktivitas positif mantan narapidana terorisme digunakan untuk menunjukkan proses kembalinya mereka ke kehidupan sosial serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan deradikalisasi dan reintegrasi.

Dalam perspektif komunikasi persuasif, penggunaan media dapat dipahami sebagai upaya membentuk lingkungan komunikasi yang mendukung proses reintegrasi. Reintegrasi tidak hanya bergantung pada perubahan individu, tetapi juga pada penerimaan lingkungan sosial. Karena itu, publikasi aktivitas positif dapat berfungsi sebagai komunikasi pendukung yang memperlihatkan bahwa mantan narapidana terorisme dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Namun, penelitian ini belum mengukur perubahan persepsi masyarakat sebagai akibat langsung dari publikasi media tersebut. Oleh karena itu, temuan penelitian hanya dapat menunjukkan bahwa media dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk mendukung proses reintegrasi sosial, bukan sebagai bukti bahwa pemberitaan tersebut secara langsung mengubah persepsi masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi persuasif merupakan unsur penting dalam pelaksanaan strategi Satgas Intelijen. Persuasi tidak hanya dilakukan melalui isi pesan, tetapi melalui hubungan yang dibangun secara bertahap dengan mantan narapidana terorisme. Komunikasi dilakukan secara interpersonal, humanis, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi sasaran.

Dalam perspektif Horgan (2008), proses tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena perubahan perilaku dan perubahan ideologis merupakan dua hal yang tidak identik. Temuan penelitian lebih kuat menunjukkan adanya strategi komunikasi yang diarahkan untuk mendukung keterbukaan komunikasi, perubahan perilaku, dan keterlibatan kembali dalam kehidupan sosial. Sementara itu, perubahan ideologis yang lebih mendalam memerlukan indikator dan pengukuran tersendiri.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif Satgas Intelijen Operasi Madago Raya dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial dilakukan melalui komunikasi yang bertahap dan berkelanjutan. Tahap penyusupan berfungsi memahami karakteristik sasaran, tahap memengaruhi membangun hubungan melalui pendekatan persuasif, tahap mengarahkan dan mengendalikan mempertahankan komunikasi serta mendorong aktivitas positif, sedangkan tahap pemanfaatan memperluas komunikasi kepada masyarakat melalui media. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif menjadi penghubung antara pendekatan interpersonal dengan upaya mendukung proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme.

Kesimpulan

Perubahan paradigma Operasi Madago Raya dari pendekatan keras (*hard approach*) menjadi pendekatan lunak (*soft approach*) yang persuasif dan humanis terbukti menjadi strategi kunci dalam pelaksanaan program deradikalisasi serta

pendorong keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme di Kabupaten Poso. Pendekatan yang diimplementasikan secara terstruktur oleh Satgas Intelijen melalui empat tahapan penggalangan ini berakar kuat pada Teori Komunikasi Persuasif. Ketiadaan basis data awal diatasi melalui tahap penyusupan, di mana Satgas Intelijen mengumpulkan informasi karakteristik mantan narapidana terorisme melalui sinergi dengan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta mitra pro-NKRI hingga berhasil memetakan 46 Target Operasi ke dalam kategori merah, kuning, dan hijau.

Selanjutnya, tahap mempengaruhi dijalankan melalui pendekatan silaturahmi yang humanis guna meruntuhkan resistensi psikologis sasaran. Dengan mengedepankan kredibilitas sumber serta pemrosesan pesan jalur periferal via komunikasi informal dan bantuan personal, Satgas Intelijen mampu membangun rasa percaya tanpa menyinggung ideologi. Hubungan yang telah terbangun kemudian diperkuat pada tahap mengarahkan dan mengendalikan melalui ruang-ruang interaksi santai seperti diskusi di warung kopi. Ruang dialog ini mendorong pemrosesan pesan jalur sentral dan mengurai disonansi kognitif, sehingga mantan narapidana terorisme secara sukarela menghentikan keterlibatan fisik maupun keyakinannya (*behavioral and psychological disengagement*) serta beralih pada aktivitas sosial ekonomi yang positif.

Rangkaian penggalangan tersebut disempurnakan melalui tahap pemanfaatan, di mana Satgas Intelijen menjalin kerja sama strategis dengan berbagai media cetak dan *online* untuk mempublikasikan aktivitas positif para mantan napiter. Publikasi narasi tandingan ini tidak hanya membangun kembali penerimaan masyarakat lokal terhadap mantan narapidana terorisme, tetapi juga menutup ruang gerak kelompok radikal untuk mempengaruhi mereka kembali. Secara keseluruhan, integrasi fungsi penggalangan intelijen dengan komunikasi persuasif berhasil mentransformasikan pola deradikalisasi dari sekadar pengawasan hukum menjadi proses pembentukan sikap moderat secara sukarela demi mewujudkan stabilitas keamanan wilayah yang berkelanjutan.

Guna mengoptimalkan keberlanjutan dan efektivitas program deradikalisasi ini, Satgas Intelijen Operasi Madago Raya disarankan untuk membangun basis data mantan narapidana terorisme yang terintegrasi dan terdokumentasi secara berkala guna memudahkan pemetaan target serta pengukuran tingkat radikalisme secara akurat. Selain itu, metode komunikasi informal seperti pendekatan warung kopi disarankan untuk terus dipertahankan dan dilembagakan sebagai ruang dialog yang aman (*safe space*), khususnya bagi target kategori kuning dan hijau yang telah membuka diri, serta secara bertahap diperluas untuk merangkul target kategori merah melalui pendampingan keluarga. Satgas Intelijen juga direkomendasikan untuk memperluas kolaborasi lintas sektor terutama dengan lembaga pemberdayaan ekonomi dan Da'i Kamtibmas guna mendukung kemandirian usaha eks-napiter, sekaligus mengintensifkan publikasi narasi damai melalui media massa untuk mencegah stigma negatif serta menutup ruang rekrutmen ulang oleh jaringan radikal.

Referensi

Adianto, M. A. T., & Subroto, M. (2023). Tantangan Reintegrasi Sosial Pada Kelompok Rentan Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 791. <https://doi.org/10.31604/Jim.V7i3.2023.791-794>

- Braca, A., & Dondio, P. (2023). Developing persuasive systems for marketing: The interplay of persuasion techniques, customer traits and persuasive message design. *Italian Journal of Marketing*, 2023, 369–412. <https://doi.org/10.1007/s43039-023-00077-0>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis A Practical Guide*. Sage Publications
- Breves, P. (2023). Persuasive communication and spatial presence: A systematic literature review and conceptual model. *Annals of the International Communication Association*, 47(2), 222–241. <https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169952>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (6th Ed.). Sage Publications.
- Fauzi, E. P. (2019). Kedai Kopi Dan Komunitas Seni Sebagai Wujud Ruang Publik Modern. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/Jurnalisa.V5i1.9893>
- Horgan, J. G. (2008). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3–8.
- Horgan, J. G. (2009). *Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*. Routledge.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change*. Yale University Press.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.V9i2.561>
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/Gk.2023.20072>
- Lukitaningsih, L., & Juliani, D. (2021). Warung Kopi Sebagai Ruang Publik Dari Masa Ke Masa Di Kota Medan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 10–19. <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V13i1.18639>
- Mukorobin, U., Sulaiman, A. I., & Sutikna, N. (2023). Effective Communication In Deradicalization Of Ex-Terrorism Convict. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 17(2), 211–220. <https://doi.org/10.24090/Komunika.V17i2.8062>
- Nugrahajati, S. D., & Suparno, B. A. (2024). Program Deradikalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(3), 417. <https://doi.org/10.31315/jik.V21i3.11440>
- Purwosunu, S., Hermansah, T., Fanshoby, M., & Rahman, W. F. N. (2026). Strategi komunikasi dakwah dalam upaya deradikalisasi kelompok Islam garis keras di Indonesia. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 29(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/50022>
- Ravitch, S. M., & Carl, N. M. (2020). *Qualitative Research: Bridging The Conceptual, Theoretical, And Methodological*. Sage Publications. https://books.google.co.id/books?id=0wy_Xgeacaaj
- Rini Agustin, E., Nurhadi, N., & Galih Pudyastuti, S. (2024). Makna Ruang Publik Kedai Kopi Bagi Remaja Di Wilayah Solo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(3), 1153. <https://doi.org/10.31604/Jim.V8i3.2024.1153-1160>
- Santoso, A., & Muhammad Ridwan Yunus. (2024). Warung Kopi Karang Panas Sebagai Sarana Komunikasi Sosial Di Masyarakat Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus Iisip Yapis Biak*, 19(1), 72–79. <https://doi.org/10.52049/Gemakampus.V19i1.366>